

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)

Oeh

Astried Anggraeni

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

ABSTRACT

The research aims to analyzing the effect of capital expenditure of the financial performance with the local revenue as an intervening variable, in every regency and the city in D.I Yogyakarta at time of 2005-2014. The data analyze is using Partial least square by Smart-PLS application, because financial performance variable have some indicators and can't be analyzed directy. The result of this research shows that capital expenditure is not giving any significant positive effect to the financial performance in every regency in D.I Yogyakarta.

This research prove that local revenue could mediate the relationship between capital expenditure and performance financial in regency of Kulon Progo and the city of Yogyakarta.

In the three other regency, these research is not showing any significant positive effect between the capital expenditure for financial performance with the local revenue as an intervening variable.

Keywords: capital expenditure, financial performance, local revenue

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Puspitasari, 2015). Salah satu penilaian dalam pengelolaan anggaran dikatakan baik adalah melalui penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja pada suatu organisasi yang menggunakan indikator keuangan. Dari penilaian kinerja keuangan kita dapat menilai bagaimana kinerja laporan keuangan yang disampaikan oeh pemerintah khususnya dalam indikator keuangan. Selain kedua UU tersebut ada hukum yang

melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yaitu surat Al- Qur'an (Al-Baqarah:188 dan An-Nisa: 58). Dari kedua ayat tersebut pada hakekatnya pemerintah sebagai khalifah dari rakyatnya memiliki amanat dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Keuangan pemda Kabupaten/kota pada D.I Yogyakarta Tahun 2014 (%)

Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas	Rasio Pertumbuhan	Rasio Keserasian
Kab. Kulon Progo	22,42	94,66	171,09	11,71	13,83
Kab. Bantul	34,48	93,74	124,08	19,31	18,26
Kab. Gunung Kidul	17,24	92,29	176,35	71,98	10,05
Kab. Sleman	55,43	91,32	119,47	9,33	14,92
Kota Yogyakarta	71,44	91,57	116,41	11,47	14,45

Sumber: BPS Yogyakarta (diolah 2016)

Pada gambar di atas kita dapat melihat kinerja keuangan dari setiap pemda kabupaten dan kota di provinsi D.I Yogyakarta. Kita dapat melihat kemampuan keuangan dari nilai beberapa rasio diatas dimana di kabupaten dan kota di D.I.Yogyakarta masih tergolong rendah di banyak beberapa rasio dan kota.

Selain peniaian rasio yang renda di kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta fakta lain mengenai belanja modal dalam laporan realisasi APBD 2014 oeh DJPK – KEMENKEU RI. Belanja modal daerah dengan nilai yang rendah dimiliki oleh beberapa provinsi di pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan termasuk provinsi D.I Yogyakarta. Belanja modal memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak baik dalam kemampuan keuangan dan kemandirian daerah. PAD merupakan sumber keuangan dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan suatu daerah. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau dengan kata lain mewujudkan kemandirian daerah sesuai tujuan di laksanakan otonomi daerah.

Berangkat dari uraian diatas maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh perencanaan pembangunan fiskal atau anggaran belanja modal terhadap kinerja keuangan. Peneliti ingin melihat adakah pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Yogyakarta, karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda terutama mengenai kemampuan daerah yaitu belanja daerah serta

bagaimana kondisi kinerja keuangan pada setiap pemda. Selain itu penelitian sebelumnya Nugroho (2012) menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, juga menjadi tambahan motivasi untuk meneliti lagi mengenai belanja modal terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Lindri Puspitasari (2015), Nugroho (2012) Eka (2015). Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan, dilakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Intervening, studi kasus setiap pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta”.

Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku principal bagi Pemda (agen), harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran. Anggaran ha sangat sensitive karena realisasinya selain harus sesuai dengan tujuan juga bagaimana tingkat efisiensi, efektif dan ekonomis dari anggaran tersebut. Saah satu anggaran yang menyentuh angung dengan kebutuhan masyarakat adaah beanja moda. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi & Harianto,2007). Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan namun dengan arah negatif. Darwis (2015) mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pada Puspitasri (2015) dan Eka (2015) membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Dari paparan diatas dan tujuan peneliti ingin membuktikan hasil analisis per kabupaten dan kota sehingga diturunkannya hipotesis pada penelitian ini yaitu :

- H1: Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo.
- H2: Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Bantul.
- H3: Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Gunung Kidul.
- H4: Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Sleman.
- H5: Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pada Kota Yogyakarta.

Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli

Daerah

Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi.2006).

Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkat kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya, dimana PAD adalah “peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari suatu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya (Nugroho.2012).

Hipotesis yang dikembangkan dari rerangka ini adalah sebagai berikut:

H6 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening pada Kabupaten Kulon Progo

H7 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening pada Kabupaten Bantul

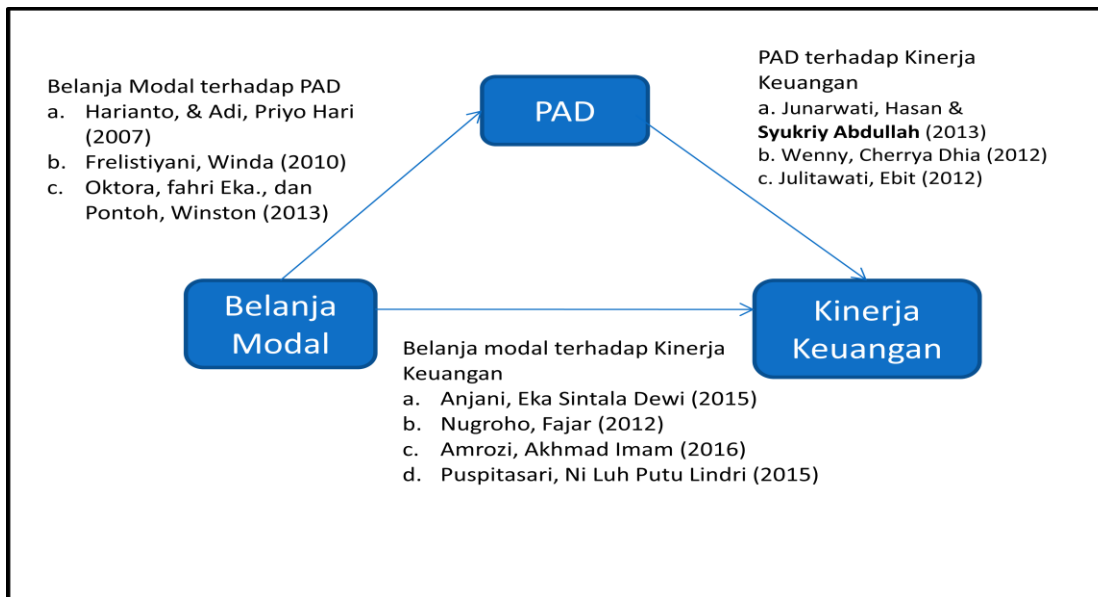
H8 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening pada Kabupaten Gunung Kidul

H9 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening pada Kabupaten Sleman

H10 : Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening pada Kota Yogyakarta

II. METODE PENELITIAN

Model penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independen yaitu Belanja Modal dan Variabel Penyela atau intervening yaitu PAD terhadap Kinerja Keuangan dimana di sertai beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian terkait.



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari laporan realisasi APBD yang diperoleh dari dokumen statistik keuangan daerah yang didapatkan di Badan Pusat Statistika (BPS) D.I Yogyakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan realisasi APBD setiap kabupaten dan Kota di D.I Yogyakarta tahun 2005-2014.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Kinerja Keuangan

Pada penelitian ini kinerja keuangan menjadi variabel Dependen yang dimana kinerja keuangan memiliki beberapa indikator ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan keuangan, dan rasio keserasian (Sularso & Restianto, 2011).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin dikatakan baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja daerah}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dengan anggaran pendapatan asli daerah atau target yang diharapkan sesuai dengan potensi riil daerah. Dengan rasio ini kita mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah dengan rencana keuangan yang telah di anggarkan.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100 \%$$

Keterangan:

P_n = Total pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total pendapatan daerah yang dihitung tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Dengan rasio pertumbuhan kita dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan yang baik adalah yang tiap tahun semakin meningkat maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan baik.

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Realisasi belanja}} \times 100 \%$$

Dengan rasio keserasian melalui rasio belanja modal dengan realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rasio keserasian memberikan kita gambaran bagaimana pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal pada alokasi dana.

2. Variabel Belanja Modal

Pada penelitian ini belanja modal merupakan variabel Independen. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

3. Variabel Pendapatan asli Daerah

Variabel PAD pada penelitian ini adalah sebagai variabel intervening atau variabel diantara atau penyela. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah

Uji Kualitas Data

Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode yang sama diantaranya Nugroho (2012), Anjani (2015) dan Astiti, D.N.Y (2016),. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda. *Square Equation Modeling* (SEM) memberikan kemampuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi Smart PLS 3.

Metode *Partial Least square* (PLS) dipilih dalam penelitian ini dikarenakan kinerja keuangan tidak dapat diukur secara langsung. Variabel tersebut mempunyai indikator-indikator untuk mengukurnya dimana indikator kinerja keuangan yaitu berupa rasio-rasio. Berikut beberapa keunggulan dari software Smart PLS yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Orientasi analisis smart PLS lebih ke arah prediksi bukan konfirmasi model
- b. Jumlah sample yang dibutuhkan dalam analisis relatif kecil dan data dalam analisis smart PLS tidak harus memiliki distribusi normal
- c. SmartPLS mampu menguji model formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator berbeda dalam satu model. Apapun bentuk skalanya (rasio kategori, Likert, dan lain-lain) dapat diuji dalam satu model.

Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah

kinerja keuangan, PAD, dan belanja modal. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Outner Model

Secara keseluruhan outer model pengukuran dari indikator-indikator pada variabel laten dimana dalam penelitian ini merupakan indikator-indikator dari kinerja keuangan. Outer model atau evaluasi *measurement*, pada outer model ini kita menganalisis yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas atau *convergent validity*, model ini menspesifikansi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan *loading factor*. Atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika *loading factor* lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur, namun jika nilainya diatas 0,5 atau 0,6 terhadap konstruk yang dituju sudah dapat diterima. Selain *loading factor* pada uji validitas *convergent* dapat dilihat nilai *Average variance extracted* (AVE). Dimana dikatakan valid jika nilai diatas 0,5.

Uji validitas lainnya itu *discriminant Cross loading*. Pada nilai *Cross loading* kita melihat bagaimana nilai dominan pada indikator-indikator terhadap variabel latennya. *Cross loadings* berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk yang dituju memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi.

Uji Reliabilitas model yang digunakan pada penelitian ini adalah composite reliability. Uji reliability dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7.

Uji Hipotesa

Inner model

Pengujian model struktural (inner model), dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten (pengujian hipotesis). Menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. R-square berfungsi

menjelaskan kemampuan independent variable menjelaskan dependent variable. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar kemampuan variabel tersebut dapat menjelaskan variabel tertuju.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik resampling dan bootstrapping. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai t statistik hasil analisis data lebih besar dari t tabel. Uji hipotesis dengan melihat *Estimate for Path Coefficients* merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Pada penelitian ini menggunakan 10 sample sehingga Nilai signifikan yang digunakan (one tailed) t-value atau nilai t tabel yang digunakan 1,89 (signifikan 5%). Sehingga dalam penelitian ini hipotesis dapat diterima jika memiliki t statistik atau t hasil analisis pada tabel *Path Coefficient output SmartPLS 3* lebih besar dari t-tabel yaitu 1,89.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Kabupaten dan Kota D. I Yogyakarta
 Nilai Rata-rata selama sepuluh tahun 2005-2014
 (Belanja Modal dan PAD dalam ribuan)

Keterangan	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
Belanja Modal	90.186.537,7	149.702.061	115.193.048,4	229.677.968	95.862.791
PAD	61.098.118,2	125.615.127	56.101.688,6	750.573.634	219.444.516
Rasio Efektivitas	1,231	1,239	1,235	1,281	1,170
Rasio Efisiensi	0,962	0,964	0,92	0,885	0,956
Rasio Kemandirian	0,112	0,158	0,081	0,28	0,409
Rasio Keserasian	0,131	0,142	0,155	0,125	0,115
Rasio Pertumbuhan	0,149	0,162	0,211	0,21	0,128

Dari tabel di atas kita dapat melihat statistik deskriptif rata-rata nilai pada Kabupaten dan Kota di D.I Yogyakarta. Nilai tertinggi rata-rata belanja modal adalah Kabupaten Sleman. Nilai Rata-rata PAD tertinggi juga didapatkan pada kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memang merupakan kota lebih modern dan lengkap baik dari sarana prasarana dan kemajuan daerahnya. Rasio kemandirian tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dan Pertumbuhan yang tertinggi yaitu pada Kabupaten Gunungkidul. Dimana kemampuan mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat merupakan cerminan dari rasio kemandirian. Rasio Efektif dan Efisien tertinggi dari nilai rata-rata sepuluh tahun dipegang oleh Kabupaten Bantul. Dan Rasio keserasian tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul.

Outer Loading

Hasil Kalkulasi Algoritma Awal (Outer Model) Kabupaten dan Kota D. I Yogyakarta

Nilai *Loading Factor*

Keterangan	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Seman	Kota Yogyakarta
Rasio Efektivitas	0,934	0,534	0,848	0,601	0,843
Rasio Efisiensi	0,394	0,317	-0,389	0,842	0,593
Rasio Kemandirian	0,819	-0,077	0,900	0,675	0,861
Rasio Keserasian	0,605	0,971	-0,839	-0,592	-0,362
Rasio Pertumbuhan	0,321	0,692	0,911	-0,442	0,416

Langkah awal evaluasi model dengan PLS dalam penelitian ini, seperti yang telah dijabarkan metode penelitian adalah evaluasi pada model pengukuran/ *measurement (outer model)*. Evaluasi *outer model* yang pertama yaitu evaluasi konstruk dengan indikator reflektif. Outer model adalah hal yang dilakukan pertama kali melihat bagaimana nilai indikator-indikator terhadap variabel laten. Variabel kinerja keuangan merupakan variabel laten yang memiliki beberapa indikator. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat *Loading factor* untuk indikator yang ada dibawah 0,5 indikator harus di drop dari model karena tidak memenuhi syarat. Setelah indikator yang di bawah 0,5 di drop dari model dilakukan *calculate algortihm* kembali, berikut hasil kalkulasi akhir algoritma PLS model peneitian ini:

Hasil Kalkulasi Algoritma Akhir (Outer Model) Kabupaten dan Kota D. I Yogyakarta

Nilai *Loading Factor*

Keterangan	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Seman	Kota Yogyakarta
Rasio Efektivitas	0,976	0,587	0,853	0,623	0,822
Rasio Efisiensi				0,614	
Rasio Kemandirian	0,979		0,971	0,891	0,933
Rasio Keserasian		0,956			
Rasio Pertumbuhan		0,783	0,801		

Inner Loadings

Inner Loadings merupakan pengujian terhadap model sebagaimana dihipotesiskan. Pengujian mengenai *inner loadings* menunjukkan pengujian terhadap hubungan masing-masing variabe laten yang pada peneilitian ini variabel laten adalah Belanja modal, PAD dan Kinerja keuangan. *Inner model* juga merupakan uji hipotesis. Pada aplikasi Smart PLS *Inner loadings* adalah hasil *boostraping*.

Kabupaten/Kota	T statistik bootstrapping PLS		Keterangan	T hasil hitung rumus Sobel		Keterangan
	Arah	BM -> KK		Arah	t hitung	
Kab. Kulon Progo	Positif	0,291	H1 ditolak	Positif	3,437	H6 diterima
Kab. Bantul	Positif	1,049	H2 ditolak	Negatif	0,495	H7 ditolak
Kab. Gunung Kidul	Negatif	0,937	H3 ditolak	Positif	0,931	H8 ditolak
Kab. Sleman	Positif	0,293	H4 ditolak	Positif	0,32	H9 ditolak
Kota Yogya	Positif	1,489	H5 ditolak	Positif	2,308	H10 diterima

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan

Ditolaknya hipotesis 1 sampai 5 memberikan hasil bahwa dalam penelitian ini tidak menunjukkan dimana ada pengaruh yang signifikan positif Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada setiap 4 Kabupaten dan 1 Kota di provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil analisis perhitungan menunjukkan bahwa meningkatnya belanja modal akan meningkatkan kinerja pemerintah tidak terjadi menurut penelitian yang saya lakukan. Tentu saja hal ini diluar harapan dan dugaan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang sama juga di peroleh dari penelitian terdahulu, dimana bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

- a. Pada penelitian Nugroho 2015 dimana hipotesis mengenai dugaan adanya pengaruh signifikan positif belanja modal terhadap kinerja keuangan ditolak. Hasil perhitungan menggunakan alat PLS tersebut menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan namun kearah negatif, sehingga dinyatakan hipotesis ditolak. Pada penelitian tersebut Nugroho 2015 menyatakan bahwa Hal ini dikarenakan kinerja pegawai yang tidak maksimal dan lebih cenderung untuk melakukan tindakan korupsi dengan menyalah gunakan anggaran belanja modal tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Istri Wali Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih yang juga sebagai anggota DPRD kota Salatiga ini dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
- b. Darwis (2015) hasil penelitian dia didapatkan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Darwis (2015) juga menyatakan belanja modal yang terjadi kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian antar daerah.

Di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	50,13	15,71	15,34	17,41	19,71	25,26
2. Ketertiban dan Keamanan	0,63	0,87	1,19	1,05	1,99	0,03
3. Ekonomi	8,98	8,24	5,55	8,69	12,67	5,84
4. Lingkungan Hidup	1,57	0,29	1,67	1,47	2,13	3,47
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	13,47	13,39	11,27	5,75	19,73	17,41
6. Kesehatan	4,81	12,72	16,21	9,91	27,29	13,51
7. Pariwisata dan Budaya	11,53	0,48	0,73	0,83	0,96	1,17
8. Pendidikan	7,15	47,72	46,69	53,67	13,91	31,62
9. Perlindungan Sosial	1,74	0,58	1,35	1,21	1,62	1,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<http://yogyakarta.bps.go.id>

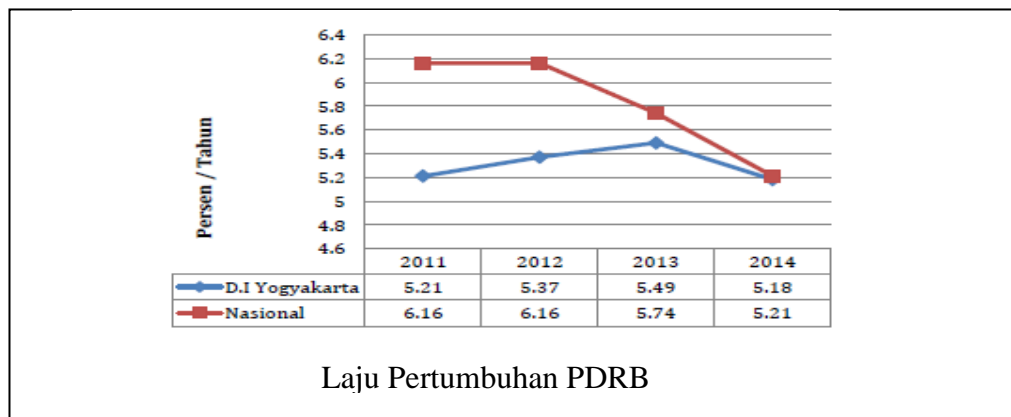
Menurut Statistik Keuangan Daerah tahun 2013-2014 bahwa realisasi belanja Kab/Kota di D.I Yogyakarta paling banyak membelajakan anggarannya di sektor pendidikan. Dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten dan Kota di provinsi Yogyakarta memberikan perhatian kepada pelayanan umum atau fasilitas umum dengan nilai persentasi yang lebih sedikit. Sehingga dapat dikatakan perhatian pada setiap pemda Kabupaten/kota di D.I Yogyakarta lebih besar pada pendidikan jika dibandingkan terhadap belanja modal atau belanja pembangunan.

Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar golongan pendapatan. Penyebab kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi dan sosial DIY adalah adanya perbedaan distribusi sumber daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Pada pembahasan Bab 1 pada gambar 1.1 mengenai Grafik Realisasi Belanja Modal Daerah Seluruh Indonesia tahun 2013 didapatkan bahwa DIY adalah termasuk Provinsi yang rendah terhadap daerah lain.

Pemerataan pembangunan daerah dengan peran pemerintah adalah penting untuk daerah tertentu yang tertinggal, mengingat dimana tingkat investasi swasta pada daerah tersebut yang masih rendah. Pada daerah daerah tertinggal tersebut tentu harapannya bantuan pemerintah untuk mempercantik dan membangun infrastruktur wilayah agar usaha swasta mulai berkembang. Pada tahun 2014 pada analisis kinerja keuangan di dapatkan

perbandingan belanja modal terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota D.I Yogyakarta 10 -15 persen dimana angka tersebut angka yang cukup kecil.

Penyerapan belanja daerah dipengaruhi oleh kinerja SKPD sehingga peningkatan kinerja SKPD diharapkan dapat optimal. Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal di DIY tergolong rendah seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM, dan program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah DIY. Masalah yang harus dikedepankan dalam analisis pembangunan daerah DIY salah satunya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah (analisis pembangunan wilayah Provinsi D.I Yogyakarta.2015).



Sumber : BPS. 2014

Perekonomian Provinsi DIY selama tahun 2010-2014 menunjukkan kinerja kurang baik, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen dimana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yaitu sebesar 5,9 persen. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi, dimana dengan pertumbuhnya ekonomi dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja terbesar pemda Kabupaten dan Kota D.I Yogyakarta paling besar pada pos pendidikan atau upaya peningkatan mutu SDM. Dimana belanja modal D.I Yogyakarta tergolong masih kecil. Realisasi belanja modal memerlukan efektivitas dan efisien yang baik agar anggaran belanja modal dapat memberikan

pembangunan kuantitas dan kualitas yang baik dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada kenyataannya tidak ada nampaknya penambahan laju pertumbuhan ekonomi dimana digambarkan pada gambar 4. Laju perekonomian tahun 2012-2014 tersebut menunjukkan bahwa kinerja kurang baik. Sehingga tidak didapatkan dalam penelitian ini khususnya belanja modal Kabupaten dan Kota D. I Yogyakarta memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan.

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan dengan melalui PAD sebagai variabel Intervening

Pada analisis hipotesis H6 sampai H7 mengenai bagaimana pengaruh belanja modal terhadap Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening menemukan hasil yang berbeda di beberapa daerah. Pada H7, H8 dan H9 yaitu pada daerah Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul dan Kab. Sleman menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening atau hipotesis ditolak. Sedangkan pada H6 dan H10 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan dinyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima.

Pada penelitian sebelumnya didapatkan yaitu Puspitasari (2015) bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Dimana belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika. Semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Nugroho (2012) dimana hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga masyarakat lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya, akan meningkatkan PAD, peningkatan PAD ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa perlu adanya pemerataan pembangunan setiap daerah. Pada hasil analisis pada penelitian ini dapat menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo memberikan hasil adanya pengaruh signifikan positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD sebagai

variabel intervening. Sehingga pada kedua daerah tersebut sudah dapat diartikan secara empiris penelitian adanya pengaruh dimana meningkatnya belanja modal dapat memberikan pengaruh juga meningkatnya kinerja pemerintah melalui pendapatan asli daerah.

Namun pada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul serta Sleman tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan melalui PAD. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan serta efisien dan efektif yang merata pada semua daerah. Kemungkinan besar ketiga daerah tersebut belum menunjukkan pembangunan daerah seperti yang diharapkan serta output yang baik tidak menunjukkan bahwa belanja pembangunan di daerah tersebut memberikan pengaruh kinerja pemerintah daerah serta PAD ketiga daerah tersebut.

Selain itu, dengan anggaran belanja pembangunan daerah maka harapan dampak terhadap laju perekonomian daerah dimana yang akan berakhir pada peningkatan PAD daerah tersebut. Namun peningkatan PAD terhadap alokasi belanja modal tidak langsung pada periode tersebut atau sebagai contoh peningkatan belanja modal 2011 tidak dapat langsung mempengaruhi PAD 2011. Bahwa suatu kejadian tidak selalu dipengaruhi faktor-faktor yang sama tetapi juga pada waktu sebelumnya dimana pada kondisi tersebut adalah lag. Sehingga ada kemungkinan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel intervening suatu daerah adalah tidak digunakannya lag pada regresi penelitian ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dijabarkan dalam bab IV maka kesimpulan yang dapat ditarik berupa:

2. Hasil menunjukkan secara empiris belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
3. Hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Namun tidak demikian pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman hasil menunjukkan tidak berpengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas harapannya pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota D.I Yogyakarta lebih perhatian terhadap belanja pembangunan. Mengenai kinerja keuangan setiap Kabupaten dan Kota D.I Yogyakarta memiliki kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif harapannya menjadi evaluasi dalam penganggaran dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Kinerja keuangan seperti kemandirian dan pertumbuhan harapannya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan drastis perlu adanya evaluasi dan perhatian. PAD pada Kabupaten dan Kota D.I sudah terlihat terus meningkat tiap tahunnya walaulupun kenaikannya juga fluktuatif dilihat dari rasio efektivitas, namun cukup baik karena setiap tahunnya ada kenaikan angka rupiah pada.

Pada pertimbangan penulis selanjutnya diharapkan

1. Penelitian lebih digeneralisasi agar lingkungnya lebih luas dan lebih banyak sample apabila akan meneruskan penelitian ini.
2. Selain itu sangat di sarankan penggunaan lag untuk menilai ulang waktu khususnya dengan variabel PAD.
3. Ada lebih baik nya adanya penambahan variabel mengenai aspek non keuangan. Dapat ditambahkan juga variabel seperti pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita.
4. Selain ditambahkan variabel dan data non keuangan bisa juga melihat pengaruh setiap indikator variabel lain, seperti contohnya PAD maka indikatornya melihat dari pajak, retribusi daerah serta indikator belanja modal.
5. Selain itu masukan dengan dugaan adanya multikol dengan adanya unsur yang sama antara variabel indipenden dengan perhitungan indikator rasio rasio variabel dependen maka dengan itu harapannya untuk menguji multikolinitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, A. Imam. 2016. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. Vol 1 No.1. ISSN 2502-3764.
- Anjani, E. S. D., et al. 2015. *Hubungan PAD, Belanja Modal dan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Darwis, E.T.R. 2015. *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1605/1228>.
- Frelistiyani, Winda. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2 (1): 53-64.
- Hariato, D., dan P.H. Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. *Simposium nasional Akuntansi X Makasar*.
<http://simreg.bappenas.go.id/document/publikasi/DokPub/Analisis-provinsi-DI-Yogyakarta-2015-ok.pdf>
- Jayanti, Widya. 2013. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Per. Kapita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. eprints.ums.ac.id
- Julitawati, Ebit., Darwanis., dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh*. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.1, No. 1
- Junarwati., Basri H., dan Abdullah, S. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol.6 No. 2: 186-193
- Kurniawan, Agus. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung*. *Tesis*. Universitas Lampung.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, F. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2): 1-14.
- Oktora, F. E., dan W. Pontoh. 2013. *Analisa Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Accountability*, 2 (2) : 1-10
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

———. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pendapatan Daerah.

———. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

———. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

———. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

———. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

———. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

———. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

———. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Puspitasari, N. L. P. Lindri., Adiputra, M. P., dan Sulindawati, G. Erni. 2015. Pengaruh belanja modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangandengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*

Simanullang, G. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008-2012. *Umrah Journal of Accounting* 1(1) : 1-24.

Sularso, H. dan Y. E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*,

Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2 (1) : 39-51.

<http://bps.yogyakarta.go.id>

www.djpk.depkeu.go.id